

BAB IV

PENUTUP

Upaya Bangsa Indonesia untuk meluruskan kembali arah pembangunan menuntut terjadinya reformasi total kebijakan pembangunan disegala bidang. Penyelenggaraan pembangunan itu sendiri tidak mungkin tercapai dengan sempurna tanpa adanya pengawasan dan Rencana Kerja. Periode sekarang merupakan masa yang krusial dan penuh tantangan bagi Inspektorat dalam menjalankan fungsinya, dalam kerangka Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, karena begitu besarnya tanggungjawab yang dibebankan kepada Inspektorat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013-2018, yaitu **“Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”**, terutama misi yang ketiga *“Meningkatkan kinerja Pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik”*.

Pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang pemerintahan masih diwarnai dengan berubah-ubahnya konsep pemikiran, kebijakan (*policy*), dan patok unggul (*benchmark*) yang dipergunakan, maupun pembenahan peraturan/produk hukum, dalam rangka mencari bentuk terbaik penyelenggaraan pemerintahan, telah mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jawa Barat, khususnya yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Implikasi dari hal ini adalah masih tersendat-sendatnya keterpaduan langkah dan kolektivitas Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun daerah.

Rencana kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran (Dana) yang harus memadai karena dengan adanya dukungan anggaran yang sesuai dengan yang di

rencanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pengawasan maka pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif, jika tidak didukung dengan anggaran yang di rencanakan maka kegiatan pengawasan terhadap Instansi Pemerintah dalam kerangka pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan menciptakan pemerintah yang bersih tidak akan tercapai serta sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik lingkup Daerah maupun Nasional.

Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai aparat pengawasan fungsional mempunyai modal dasar berupa potensi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan serta potensi sumberdaya, baik berupa manusia maupun sumberdaya lainnya dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat khususnya dan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada umumnya.

Hal tersebut di atas dapat dicapai apabila komitmen yang tertuang dalam Rencana Kerja dapat diselenggarakan secara konsisten oleh seluruh jajaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat, legislatif, maupun eksekutif Provinsi Jawa Barat itu sendiri apabila didukung dengan anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat 2015 ini dibuat untuk dijadikan acuan penyelenggaraan tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan yang profesional dan konstruktif dalam mendorong akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Bandung,

INSPEKTUR PROVINSI JAWA BARAT

H. PERY SOEPARMAN, SH, MM, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

